

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penciptaan Karya**

Laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, sebagai negara kepulauan menjadikan laut sebagai jantung dari perdagangan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya. Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Garis pantai Indonesia yang membentang sepanjang 99.093 km membuat sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang dimana kondisi ini memperlihatkan bahwa laut tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia (Yistiarani, 2020).

Ketergantungan terhadap ruang laut tersebut tercermin secara nyata di wilayah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah memosisikan wilayah pesisir sebagai "Halaman Depan" pembangunan, dengan sektor kelautan sebagai pilar ekonomi utamanya (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2024). Ambisi ini didorong oleh potensi sumber daya laut yang melimpah, di mana target produksi perikanan tangkap terus dioptimalkan guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan memenuhi kebutuhan hidup ribuan nelayan yang beroperasi di sepanjang garis pantainya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024).

Kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Gunungkidul sangat bergantung pada dinamika Laut Selatan, di mana tercatat sebanyak 2.276 nelayan menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas penangkapan ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Bagi nelayan, laut tidak hanya dipahami sebagai bentang alam, melainkan sebagai sumber penghidupan utama yang menopang keberlangsungan ekonomi keluarga. Ketergantungan terhadap hasil laut menjadikan profesi nelayan memiliki posisi sentral dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir,

meskipun mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian hasil tangkapan serta risiko kerja yang tinggi akibat kondisi alam. Situasi ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan ekonomi nelayan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan laut yang mereka hadapi setiap hari (Syahrizal, Meiyenti, Mitra, Ihsan, & Ramdesta, 2024)

Peran krusial nelayan tersebut tidak hanya berdampak pada skala rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul. Sepanjang tahun 2024, sektor perikanan tangkap mencatatkan pencapaian luar biasa dengan total hasil tangkapan menembus angka 4.058 ton (4.058.881 kg), yang didominasi oleh komoditas unggulan seperti tongkol, tuna, cakalang, layur, hingga lobster (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Aktivitas ini menghasilkan perputaran uang yang sangat besar, yakni mencapai Rp 81,5 miliar dengan rata-rata pendapatan per nelayan mengalami peningkatan yang stabil (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2024). Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan ini membuktikan bahwa nelayan adalah motor penggerak utama dalam merealisasikan visi "Halaman Depan" pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2024).

Namun, kontribusi ekonomi yang besar ini berbanding lurus dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi bagi para nelayan saat melaut. Samudra Hindia, yang menjadi wilayah tangkap utama nelayan Gunungkidul, dikenal memiliki karakteristik gelombang yang ganas dan kondisi cuaca yang dinamis.

Aktifitas melaut sering kali dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan tanpa perlindungan yang memadai, sementara kondisi cuaca yang tidak menentu dan gelombang laut yang ekstrem kerap mengancam. Profesi nelayan memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap paparan bahaya di lingkungan kerja, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan serta kecelakaan kerja. Berbagai bentuk kecelakaan kerja yang terjadi pada nelayan di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari cedera ringan hingga yang berakibat fatal,

mencakup luka ringan, luka sedang, luka berat, terkilir, patah tulang, luka bakar, hingga menyebabkan kematian (Lubis & Susilawati, 2024).

Besarnya risiko tersebut terefleksi secara nyata dalam data statistik kecelakaan laut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025, telah terjadi 62 kasus kecelakaan laut dengan total 107 korban. Dari keseluruhan korban tersebut, sebanyak 10 orang ditemukan meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang (Subarkah, 2025). Tingginya angka fatalitas ini mempertegas bahwa profesi nelayan di pesisir selatan merupakan pekerjaan yang berisiko nyawa di tengah minimnya sistem deteksi dini dan perlindungan teknis yang memadai di lapangan. Angka kecelakaan ini bukan sekadar data statistik, melainkan representasi dari ancaman nyata yang setiap hari menghantui para nelayan dalam upaya mereka menopang ekonomi daerah.

Kesenjangan antara kontribusi ekonomi yang masif dan perlindungan sosial bagi nelayan menciptakan sebuah ironi besar dalam tata kelola sektor kelautan di Kabupaten Gunungkidul. Meskipun sektor perikanan mampu menyumbangkan nilai penjualan yang sangat fantastis hingga mencapai Rp81,5 miliar pada tahun 2024, jaminan perlindungan bagi subjek utamanya justru masih absen dari skema anggaran daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul secara terbuka mengakui bahwa saat ini pemerintah daerah belum mampu menyediakan bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan karena keterbatasan alokasi dalam APBD (Priatmojo, 2024).

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan jaring pengaman sosial ini menjadi sangat kontradiktif jika melihat perbandingan angka yang ada. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover iuran perlindungan bagi 2.276 nelayan di Gunungkidul hanya berkisar Rp500 juta per tahun sebuah angka yang relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi miliaran rupiah yang dihasilkan nelayan bagi daerah setiap tahunnya. Akibatnya, para nelayan dipaksa untuk memikul risiko keselamatan secara mandiri di tengah ketidakpastian pendapatan dan ancaman cuaca

ekstrem, sementara mereka tetap dituntut untuk menyukseskan visi pembangunan "Halaman Depan" yang dicanangkan oleh negara.

Di tengah vakumnya perlindungan pemerintah dan ketidakpastian alam yang kian ekstrem, para nelayan dipaksa untuk menciptakan jaring pengaman mereka sendiri. Ketika jaminan asuransi dari pemerintah tidak tersedia dan risiko kecelakaan laut terus mengancam nyawa, doa dan kepercayaan menjadi satu-satunya sandaran yang tersisa untuk menghadapi ganasnya Samudra Hindia. Kondisi ini menjadikan tradisi Sedekah Laut bukan lagi sekadar seremonial adat tahunan atau identitas budaya pesisir, melainkan sebuah mekanisme pertahanan psikologis dan "asuransi spiritual" bagi nelayan untuk memohon keselamatan langsung kepada kekuatan alam.

Ritual Sedekah Laut menggambarkan hubungan timbal balik yang mendalam antara manusia dengan laut, di mana sesaji yang dilarung menjadi simbol negosiasi simbolik atas rasa takut dan harapan nelayan (Afriansyah & Sukmayadi, 2022). Di Pantai Baron, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara masyarakat dengan alam lingkungannya (Amanatin, Sekarmingrum, & Supangkat, 2024). Bagi nelayan, ketika kehadiran negara melalui sistem perlindungan formal seperti asuransi masih belum dirasakan secara merata, doa dan ritual menjadi satu-satunya jaminan spiritual yang mampu memberikan ketenangan batin sebelum mereka menerjang ombak (Widiastuti, Mia Meilina, & Rina Sovianti, 2018).

Pelaksanaan ritual ini terbukti mampu memberikan dampak psikologis yang nyata bagi nelayan, yakni menumbuhkan rasa percaya diri serta rasa aman saat menghadapi risiko kerja yang tinggi di tengah laut (Widiastuti, Mia Meilina, & Rina Sovianti, 2018). Tradisi Sedekah Laut juga berfungsi sebagai perekat sosial yang dilandasi oleh perasaan senasib dan sepenanggungan di antara para nelayan, yang secara kolektif berupaya menjaga keberlanjutan hidup dan ekonomi mereka (Afriansyah & Sukmayadi, 2022). Dengan demikian, film dokumenter ini tidak hanya memotret sebuah upacara budaya, melainkan sebuah realitas tentang bagaimana masyarakat pesisir mengelola

rasa takut dan menggantungkan keselamatan mereka pada kekuatan yang melampaui birokrasi negara.

Situasi ini menggambarkan bahwa perjuangan nelayan untuk memperoleh hak atas perlindungan dan jaminan keselamatan yang layak masih terus berlangsung, serta membutuhkan dukungan yang lebih nyata dari pihak pemerintah melalui kebijakan yang inklusif. Fenomena ketiadaan jaminan formal di tengah risiko nyawa yang ekstrem inilah yang menjadi dasar pemikiran Penulis dalam memproduksi film dokumenter "Aku Pulang".

Namun, merekam realitas tersebut ke dalam bentuk audio visual menghadirkan tantangan teknis dan naratif yang kompleks pada tahap pasca-produksi. Dalam produksi film ini, tim menggunakan pendekatan Mode Hibrida (Nichols, 2017). Pilihan mode ini memberikan implikasi besar bagi Penulis sebagai editor. Penulis dihadapkan pada ratusan *file* mentah yang merekam aktivitas nelayan secara acak, mulai dari kekacauan visual di laut hingga kurangnya *footage* yang mendukung. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana merangkai visual yang terpisah ruang dan waktu tersebut menjadi satu alur cerita yang koheren tanpa memanipulasi kebenaran faktualnya (Rabiger, 2015).

Permasalahan krusial sering muncul pada kualitas *footage* dokumenter lapangan. Kondisi pengambilan gambar di atas perahu yang terombang-ambing ombak sering kali menghasilkan gambar yang tidak stabil, tidak fokus, atau memiliki komposisi yang melanggar aturan garis imajiner. Jika mengacu pada standar *editing* konvensional yang mengutamakan kontinuitas teknis, banyak momen penting dalam film ini yang seharusnya dibuang karena dianggap "cacat".

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan *editing* yang tidak kaku pada aturan teknis, melainkan berfokus pada dampak psikologis. Penulis menerapkan teori "The Rule of Six" yang dikemukakan oleh Walter Murch (Murch, 2001). Teori ini menawarkan hierarki keputusan *editing* di mana aspek Emosi (51%) ditempatkan di posisi tertinggi, jauh di atas aspek kontinuitas ruang (3D Space) atau garis imajiner. Penerapan teori ini menjadi solusi

strategis bagi Penulis untuk menyelamatkan momen-momen emosional subjek seperti ketakutan di mata nelayan saat badai meskipun secara teknis gambar tersebut memiliki kekurangan. Melalui proses *editing* yang memprioritaskan kontinuitas emosional, film dokumenter "Aku Pulang" diharapkan tidak hanya menjadi arsip visual tentang nelayan, tetapi mampu mentransfer pengalaman batin dan kecemasan mereka secara langsung kepada penonton.

Mengingat kompleksitas tantangan dalam menyatukan berbagai materi visual yang beragam mulai dari wawancara yang statis, rekaman observasional laut yang dinamis, hingga momen interaksi subjek yang intim dalam format dokumenter hibrida, Penulis memerlukan sebuah landasan teoretis yang kokoh untuk mengambil keputusan penyuntingan. Tanpa pedoman yang jelas, penggabungan ketiga mode tersebut berisiko menghasilkan alur cerita yang terfragmentasi dan membingungkan. Oleh karena itu, penciptaan karya ini menerapkan teori "*The Rule of Six*" dari Walter Murch sebagai metode penyelesaian masalah. Teori ini dipilih karena menawarkan hierarki prioritas yang menempatkan Emosi (51%) sebagai elemen absolut di atas kontinuitas teknis ruang dan waktu. Melalui pendekatan ini, Penulis bermaksud membuktikan bahwa kontinuitas emosional adalah kunci utama untuk menjahit keragaman mode dokumenter tersebut menjadi sebuah narasi yang utuh dan mampu menyampaikan pesan advokasi keselamatan nelayan secara mendalam.

## **1.2. Manfaat Penciptaan Karya**

### **1.2.1. Manfaat Karya Secara Akademis**

- a. Karya ini diharapkan dapat memperkaya literatur Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang *editing* film dokumenter. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai penerapan teori "*The Rule of Six*" (Murch, 2001) dalam mengatasi kendala teknis pada *footage* dokumenter.
- b. Menyediakan bukti empiris bahwa hierarki keputusan editing yang menempatkan emosi sebagai variabel absolut (51%) mampu menjadi solusi efektif untuk menjembatani diskontinuitas teknis dan

visual yang kerap muncul akibat penggabungan mode dokumenter yang kontras.

- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji pergeseran peran editor, dari sekadar eksekutor teknis menjadi "investigator emosi" yang bertugas mengungkapkan realitas batin subjek (*the invisible*) melalui manipulasi ruang dan waktu sinematik.

#### 1.2.2. Manfaat Karya Secara Praktis

- a. Memberikan wawasan praktis bagi editor film dokumenter tentang strategi penanganan materi visual yang tidak sempurna akibat kondisi lapangan ekstrem, tanpa harus mengorbankan kekuatan cerita.
- b. Bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, hasil penyuntingan yang menekankan pada aspek emosi ini diharapkan mampu mentransfer rasa cemas dan harapan nelayan secara lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk menggugah empati publik yang lebih dalam mengenai urgensi jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional di Gunungkidul
- c. Menjadi arsip visual tradisi Sedekah Laut yang tidak hanya merekam prosesi ritualnya, melainkan juga menyajikan dimensi batin dan mekanisme pertahanan spiritual masyarakat pesisir melalui konstruksi narasi yang empatik